



Bukan Solusi Utama

WACANA penerapan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo penampungan sementara oleh Pemkot Yogyakarta mengundang sorotan banyak pihak.

Kadiv Kampanye Walhi DIY,

Elki Setiyo Hadi, menilai, kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya perencanaan yang jelas mengenai

penggunaan retribusi yang akan ditarik dari masyarakat. Ditambahkannya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota belum memiliki rencana terpadu untuk menangani permasalahan sampah dari hulu ke hilir.

"Jika retribusi ini hanya sekadar menjadi beban bagi masyarakat tanpa solusi konkret, maka kebijakan ini berpotensi hanya akan menambah kegaduhan di masyarakat," ujarnya, Jumat (1/11).

Ia juga menyampaikan, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi yang berlebihan dan mencegah penumpukan sampah, tidak akan



● ke halaman 7

- Pemkot Yogyakarta menggulirkan wacana penerapan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo.
- Uji coba sistem buang sampah berbayar sudah berlangsung pada 29 Oktober hingga 4 November 2024 ini secara bergantian di beberapa depo dan akan dilanjutkan di lokasi lainnya.
- Sepanjang masa uji coba, petugas hanya melakukan penimbangan bobot sampah yang hendak dibuang warga ke depo.

- Setelah ditimbang, warga akan menerima catatan berisi berat sampah dan perkiraan biayanya jika kelak rencana itu sudah diterapkan.
- Sampah terpilah dikenai retribusi dengan besaran Rp500 per kilogram, sedangkan yang belum terpilah dikenai Rp1.000 per kilogram.
- Wacana ini mendapat tanggapan beragam dari publik Kota Yogya, terutama masyarakat, karena jadi lebih ribet dan adanya antrean panjang.

Bukan Solusi

• Sambungan Hal 1

ada dampak signifikan jika tanpa dibareng sistem yang terintegrasi. "Permasalahan sampah bukan hanya terkait limbah yang akan dihasilkan ke depan, tetapi juga mencakup sampah eksisting yang belum tertangani dengan baik," jelas Elki.

Elki menegaskan bahwa masyarakat, meskipun terbebani dengan retribusi, akan tetap membayar karena itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia meragukan apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Selama Pemkot Yogyakarta belum mengembangkan sistem yang menyeluruh untuk mengatasi sampah, perubahan retribusi seperti ini hanya akan memberikan tekanan tambahan kepada warga tanpa memberikan solusi yang nyata," tandasnya.

Hal senada disampaikan Deputy Direktur Walhi DIY, Di-

mas R Pradana, yang menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah solusi utama untuk mengatasi permasalahan sampah yang kompleks di Kota Yogya. Menurut Dimas, persoalan mendasar dari masalah sampah di Yogyakarta terletak pada tata kelolanya yang belum optimal.

"Kebijakan sampah berbayar hanya menyentuh permukaan masalah. Akar permasalahan sebenarnya terletak pada bagaimana kita mengelola sampah dari hulu hingga hilir," tegas Dimas sembari menyebutkan bahwa retribusi sampah semata tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

› Jangan gegabah

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, mendesak eksekutif supaya tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan pembuangan sampah berbayar di depo tersebut. "Saya dengar dari masya-

rakat, itu sudah mulai diujicobakan. Tapi, baiknya dipertimbangkan lagi, karena sebenarnya masalah sampah itu sudah selesai di penganggaran, dari hulu sampai hilir," tandasnya.

Sehingga, ia menilai, sudah seharusnya masyarakat tidak dibebani lagi dengan retribusi, ketika hendak melakukan pembuangan limbah di depo. Padahal, selama ini, warga Kota Yogyakarta sudah mengemban kewajiban rutin setiap bulan, untuk membayar iuran pengelolaan sampah.

"Retribusi sudah ada, jangan sampai dobel. Karena sudah kena iuran rutin, terus ketika mau membuang di depo warga kena lagi. Jadi semakin susah nanti. Sudah membuang sampahnya saja sulit, malah disuruh membayar, kan kasihan warga," tambah Kuncoro.

Oleh sebab itu, ia berharap, kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang sebelum benar-benar diterapkan, karena berpotensi memberatkan ma-

sarakat. Terlebih, dengan kondisi beberapa depo yang masih saja dipenuhi dengan gunungan sampah, warga dipastikan bakal menaruh sentimen negatif.

"Kalau penanganannya sudah bagus dan membukakan hasil, misal sat-set, terus cepet *resik*, menampakkan Kota Yogya bersih dan tidak ada penumpukan di depo, mungkin masyarakat akan bersedia ditarik retribusi. Tapi, sekarang kan masih semrawut," urainya.

Terlebih, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, sampai sejauh ini belum ada rembugan antara eksekutif dan legislatif terkait kebijakan tersebut. Karenanya, ia mendorong, daripada menarik retribusi dari warga, Pemkot lebih baik mengusulkan anggaran tambahan untuk pengelolaan sampah.

"Ya, ditambah penganggarnya untuk pengelolaan sampah, karena masyarakat sudah banyak membayar pajak," pungkasnya. (han/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005